



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REFILZA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 242827

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 825.000.000

1. Bangunan Seluas 238 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.500.000

1. MOBIL, KARIMUN SUZUKI Tahun 0000, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 0000, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000
3. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 0000, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 94.070.883**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 981.570.883**III. HUTANG** Rp. 337.638.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 643.932.883

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.